

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurakhman, & Sunarti, L. (2023). *Meniti Ombak Sejarah Suntingan Kenangan untuk Profesor Susanto Zuhdi*. Jakarta: Penerbit Serat Alam Media.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Antikorupsi, P. E. (2023). *Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi*. Diakses pada 22 Maret 2023 dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>
- Ardianto, R. (2020). Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat. Diakses pada 25 Mei 2023 dari bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Edisi Kedua)* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Basyari, I. (2023). Bawaslu Belum Mengusut Temuan Transaksi Mencurigakan dari PPATK. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/19/bawaslu-belum-mengusut-temuan-transaksi-mencurigakan-dari-ppatk>
- Bawaslu. (2019). Masa Tenang, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang. Diakses pada 29 Oktober 2023 dari https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis_Dugaan_Politik_Uang.pdf
- Bawaslu, H. (2021). Fenomena Politik Uang. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu* Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Calsia, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Berdasarkan Teori Fraud Triangle. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 67. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.580>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(April), 52–66.

<https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>

Cilacap, B. (2021). *Subyek Hukum Yang Limitatif Celah Lemah Penegakan Hukum Pemilu*. Diakses pada 22 Maret 2023 dari <https://cilacap.bawaslu.go.id/2021.02.10/08:19/subyek-hukum-yang-limitatif-celah-lemah-penegakan-hukum-pemilu/>

Costa, F. M. L. (2024). Dugaan Kampanye dan Politik Uang Marak Terjadi Jelang Pencoblosan. Diakses pada 4 Maret 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/14/dugaan-kampanye-dan-politik-uang-marak-terjadi-jelang-pencoblosan>

Darmawati. (2020). *Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)* <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

DPR-RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1711/pdf/3458>

Fisip-UI. (2023). Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu? Diakses pada 20 Februari 2024 dari <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>

Gustiana, S. (2024). Pemilih Perempuan Jadi Sasaran Politik Uang dan Janji Manis Kontestan Pemilu. Diakses pada 15 Maret 2024 dari <https://www.konde.co/2024/01/pemilih-perempuan-jadi-sasaran-politik-uang-dan-janji-manis-kontestan-pemilu/>

Hamid, A. (2016). *Teori Negara Hukum Modern* Bandung: CV Pustaka Setia.

Hariyanto, H. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 360–379.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057>

Harris, M. (n.d.). Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang Pesat! Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/virtual-adalah/>

Huda, N. (2017). *Ilmu Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Huda, N. (2023). *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional Sistem Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Humas, K. K. D. J. (2022). Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid 2. Diakses pada 20 Maret 2024 <https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>

Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

Indah, A. V. (2020). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia: Analisis Teori Demokrasi Pendidikan Islam. *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 175. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.17641>

Indora, V., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2014). Pengaruh Politik Transaksional terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kultur Demokrasi*.

Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi*. Sleman: PT Kanasius.

Isdiyanto, I. Y. (2023). Paradoks Demokrasi dan Politik Elitis. Diakses pada 20 Februari 2024 dari https://www.koranbernas.id/paradoks-demokrasi-dan-politik-elitis?fbclid=PAAaZOm7i4mU_vFjiFK_y1zsURyLuiCb8ZpJbtJ0UhwaD2bHrBdixJZZu8A04

Junaidi, V., Agustyati, K., & Hastomo, I. S. (2013). *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

KBBI, B. P. dan P. B. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. CV Adi Perkasa.

- Kiswondari. (2021). Temuan LSI: Pilkada 2020 Masih Diwarnai Politik Uang. Diakses pada 25 Mei 2023 dari <https://nasional.sindonews.com/read/296448/12/temuan-lsi-pilkada-2020-masih-diwarnai-politik-uang-1610276483>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Maggalatung, A. S. (2015). Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, II(2).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. M. (2017). *Politik Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta Selatan: Red & White Publishing.
- Mullaney, T. S., & Rea, C. (2022). *Where Research Begins: Choosing a Research Project That Matters to You (and the World)*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Narendra, P. (2020). Politik Transaksional dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Indonesia. Diakses pada 12 Februari 2024 dari https://tegalkab.go.id/news/view/artikel/politik_transaksional_dan_implikasinya_terhadap_pembangunan_indonesia_20200929081005
- Nugroho, R. M., Sudarsono, Istislam, & Safa'at, M. A. (2022). The Urgency of Introduction Elections in the Mechanism of the Presidential Nomination in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(9), 438–445.
- Nuryawan, I. D. G. O. (2020). Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 255. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.415>
- Pane, E. (2019). *Legal Drafting*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Perludem. (2024). Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://perludem.org/2024/02/02/perludem-bagi-bagi-bansos-saat-kampanye-bentuk-politik-uang/>

- Ramadhan, M. N., Daniel, J., & Oley, B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 169–180. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Ridwan, A. (2024). Tebar Uang Menjelang Pencoblosan. Diakses pada 4 Maret 2024 dari <https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>
- Rifando, F. (2019). *Politik Hukum Pengaturan Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Pasca Reformasi*. 417856. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/182950>
- Risalah Raker Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2016).
- Risalah Raker Ke-2 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2016).
- Risalah Raker Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Raker Ke-5 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Raker Ke-9 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-1 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2016).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-3 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, arsip dpr (2017).
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-4 Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (2017).
- Rishan, I. (2020). *Hukum & Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sari, A. M. (2023). Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya. Diakses pada 24 Maret 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>
- Sari, H. (2019). *Wajah Demokrasi Indonesia: Pasca Pelantikan Hasil Pemilu 2019*. Jakarta: Lemah Pustaka Media.
- Setiyawan, W., & Mashdurohatun, A. (2021). The Reforming Of Money Politics Cases In Election Law As Corruption Crime. *Law Development Journal*, 3(3), 621. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.3.621-629>
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya

bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 2407–9138. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1659>

Subchi, I. (2024). Menuju Pemilu Jujur dan Adil. Diakses pada 5 Maret 2024 <https://mediaindonesia.com/opini/650619/menuju-pemilu-jujur-dan-adil>

Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. In *Al Amwal* (Vol. 2, Issue 1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1253819>

Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Sulaiman, N., Hertanto, & Rosyidi, B. (2014). *Competing Models in Political Coalition Analysis: System or Transactional?* Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Theodora, A. (2024). Politik Uang dan Komoditas "Suara Rakyat". Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/11/politik-uang-dan-pemilu-pasar-bebas>

Umam. (n.d.). Pengertian Budaya: Ciri-ciri, Fungsi, Unsur, dan Contohnya. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/budaya/>

Undang-Undang No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12/2011, bpk (2011).

Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, bpk.go.id (2017).

Wahidah, S. N. I., Bafadal, R. E., & Saifurruhaidi. (2017). Uang Dan Kekuasaan Politik. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v1i1.536>

Winarno, A., Bambang Sugiri, B., & Cholil, Y. (2021). Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Media Iuris*, 4(3), 341. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>

Wismabrata, M. H., & Caroline, D. (2019). 7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel. Diakses pada 25 Mei 2023 dari <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>

Wulandari, T. (2023). Apa itu Vote Buying di Pemilu? Begini Praktik Curangnya. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

[6908327/apa-itu-vote-buying-di-pemilu-begini-praktik-curangnya](https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/300791/kpu-batasi-harga-souvenir-kampanye-maksimal-rp-60-ribu)

Yonavilbia, E. (2018). KPU Batasi Harga Souvenir Kampanye Maksimal Rp 60 Ribu. Diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/300791/kpu-batasi-harga-souvenir-kampanye-maksimal-rp-60-ribu>